

Evaluasi Tata Kelola Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Tingkat Kelurahan di Bontang Lestari Kota Bontang

Achmad Zainal Abidin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: 048301429@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ketepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan pada tingkat Kelurahan Bontang Lestari serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan telah berjalan cukup sistematis melalui pendataan awal, pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, penghapusan data yang tidak sesuai, dan usulan data baru. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi warga, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah, ketidaksesuaian data awal, perbedaan persepsi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Temuan lain memperlihatkan bahwa keterlibatan RT dan masyarakat cukup membantu proses identifikasi warga, tetapi transparansi prosedur dan pemahaman publik terhadap hasil verifikasi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, disarankan pembaruan data dilakukan secara berkala, peningkatan kapasitas petugas diperkuat, pemanfaatan teknologi dioptimalkan, sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan, dan koordinasi lintas instansi diperbaiki secara berkelanjutan.

Kata kunci: data kemiskinan, kelurahan, tata kelola, validasi, verifikasi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana negara mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial secara tepat sasaran. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan (Dwiyanto, A. 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan Noviko (2024) dalam buku tentang birokrasi modern yang menekankan bahwa kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam merespons dinamika sosial masyarakat secara adaptif. Selain itu, Mendrofa et al. (2026) juga menjelaskan bahwa birokrasi publik di era sekarang dituntut tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dalam distribusi layanan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat dan mutakhir agar program bantuan sosial maupun pemberdayaan dapat tepat sasaran. Dalam pendekatan *public value management*, sebagaimana dijelaskan oleh Widyaningsih et al. (2023), nilai utama pelayanan publik terletak pada kemampuannya menjawab kebutuhan nyata masyarakat berdasarkan informasi yang valid. Hal ini juga diperkuat oleh Sujarwoto dan Sahputri (2023) dalam kajian mereka yang menunjukkan bahwa ketidakakuratan data kemiskinan dapat menyebabkan kesalahan sasaran, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Dengan demikian, data tidak lagi sekadar menjadi pelengkap administrasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan publik.

Secara konseptual, tata kelola data kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari prinsip *good governance*. Sarihati et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pelayanan publik. Hal ini juga ditegaskan dalam buku *Good Governance melalui Publik Digital* yang menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam pelayanan publik harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan data agar tidak menimbulkan distorsi informasi (Mendrofa et al., 2025). Dengan kata lain, proses verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari praktik pemerintahan yang mencerminkan kualitas tata kelola itu sendiri.

Dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas dalam pengelolaan data kemiskinan. UU Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara sistematis dan terpadu. Selanjutnya, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah menekankan pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi dalam satu sistem nasional yang akurat dan dapat diperbarui secara berkala. Namun demikian, Widyaningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih banyak daerah yang belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi pada implementasi di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan.

Dalam konteks operasional, proses verifikasi dan validasi menjadi tahap yang sangat krusial dalam memastikan kualitas data kemiskinan. Manoppo dan Laoh (2022) menegaskan bahwa verifikasi tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi harus dilengkapi dengan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardana dan Saribulan (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah digunakan, verifikasi faktual tetap menjadi kunci utama dalam menjaga akurasi data. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi tidak bisa dipandang sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai proses penting yang menentukan kualitas kebijakan sosial secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi digital memang memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kemiskinan (Kurniawan, T. 2022). Namun, Hidayat dan Amirudin (2024) menemukan

bahwa penggunaan aplikasi dalam proses validasi data tetap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, Setiawan dan Soraya (2025) menekankan bahwa digitalisasi hanya akan efektif jika didukung oleh integrasi data dan pembaruan informasi secara konsisten. Dengan demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran verifikasi lapangan, tetapi justru harus menjadi alat pendukung dalam memperkuat kualitas data.

Jika dilihat dari konteks daerah, Kota Bontang menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam penurunan angka kemiskinan. Data dari BPS Kota Bontang (2025) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Sujarwoto dan Sahputri (2023) mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan secara statistik tidak selalu mencerminkan ketepatan sasaran program di lapangan. Hal ini berarti bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, evaluasi terhadap kualitas data tetap diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif.

Secara lebih spesifik, kondisi di Kelurahan Bontang Lestari menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Data hasil verifikasi tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara data awal dengan hasil verifikasi lapangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data memiliki pengaruh besar terhadap jumlah penerima manfaat. Menurut Widyaningsih et al. (2023), perubahan data yang signifikan seperti ini dapat mengindikasikan adanya ketidaktepatan data sebelumnya atau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup cepat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana proses verifikasi dan validasi tersebut dilakukan.

Selain itu, karakteristik wilayah Bontang Lestari yang memiliki kepadatan penduduk rendah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan verifikasi lapangan, terutama dalam menjangkau seluruh rumah tangga sasaran. Ballu dan Fahlevvi (2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor geografis dan aksesibilitas wilayah dapat menjadi kendala dalam proses verifikasi data kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam proses verifikasi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah agar hasilnya lebih akurat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang, seperti percepatan validasi data dan penggunaan sistem informasi terintegrasi, menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas data kemiskinan (Suharto, 2023). Namun, Mendrofa et al. (2025) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh inovasi yang dilakukan di tingkat atas, tetapi juga oleh kualitas implementasi di tingkat bawah. Dalam hal ini, kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan data kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses tersebut dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, serta

bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Untuk memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini, penting untuk menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik verifikasi dan validasi data kemiskinan. Penelitian pertama dilakukan oleh Widyaningsih et al. (2023) yang membahas tentang pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa proses pemutakhiran data sering kali belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan pemerintah. Widyaningsih et al. (2023) menekankan bahwa akurasi data sangat dipengaruhi oleh kualitas proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama pada tingkat desa dan kelurahan sebagai pelaksana utama di lapangan.

Sejalan dengan pentingnya kualitas data dalam kebijakan sosial, penelitian kedua dilakukan oleh Manoppo dan Laoh (2022) yang meneliti pemanfaatan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi sangat bergantung pada validitas data yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa proses verifikasi dan validasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

Lebih lanjut, perkembangan penggunaan teknologi dalam pengelolaan data kemiskinan turut menjadi perhatian dalam penelitian berikutnya. Hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Saribulan (2024) yang mengkaji pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi KELOM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital mampu mempercepat proses pendataan dan pengolahan data, namun belum sepenuhnya menjamin akurasi informasi. Wardana dan Saribulan (2024) menegaskan bahwa verifikasi faktual melalui kunjungan langsung ke rumah tangga tetap menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata masyarakat.

Selain itu, tantangan dalam implementasi digitalisasi juga diungkap dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Amirudin (2024) yang menganalisis penggunaan aplikasi BANGKIT dalam validasi data kemiskinan di Kecamatan Lemahsugih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi mampu meningkatkan efisiensi proses pendataan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya literasi digital aparatur, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan yang mendukungnya.

Selanjutnya, dalam konteks integrasi data dan penguatan sistem administrasi, penelitian oleh Setiawan dan Soraya (2025) menyoroiti keterkaitan antara digitalisasi layanan kependudukan dengan

peningkatan akurasi data kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi mampu memperkuat validitas data kemiskinan, terutama jika didukung oleh penggunaan identitas tunggal dan pemutakhiran data secara berkala. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan sistem digital tetap memerlukan koordinasi lintas sektor serta pengawasan yang berkelanjutan agar data yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat.

Bertolak dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai data kemiskinan sebagian besar masih berfokus pada aspek pemutakhiran data, pemanfaatan DTKS, serta implementasi teknologi dalam proses verifikasi dan validasi. Penelitian Widyaningsih et al. (2023) lebih menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, sementara Manoppo dan Laoh (2022) mengkaji pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan sosial. Di sisi lain, Wardana dan Saribulan (2024) serta Hidayat dan Amirudin (2024) lebih menitikberatkan pada penggunaan sistem digital dalam proses verifikasi dan validasi, sedangkan Setiawan dan Soraya (2025) menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dalam meningkatkan akurasi data kemiskinan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan pada tingkat kelurahan, khususnya dalam konteks Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung berfokus pada aspek teknis atau sistem, sementara penelitian ini berupaya melihat lebih dalam dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek akurasi data, partisipasi masyarakat, koordinasi antaraktor, transparansi, ketepatan waktu, serta akuntabilitas dalam proses verifikasi dan validasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa proses verifikasi dan validasi data kemiskinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ketepatan sasaran kebijakan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, dinamika perubahan data, kendala teknis di lapangan, serta kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik menunjukkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu **1)**. Bagaimana tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan dilaksanakan pada tingkat kelurahan, khususnya di Bontang Lestari, serta **2)**. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya beserta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar proses tersebut mampu menghasilkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas tata kelola data kemiskinan, sehingga dapat mendukung terciptanya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana proses verifikasi dan validasi data kemiskinan dijalankan di tingkat kelurahan serta bagaimana upaya perbaikan tata kelola dapat dilakukan secara lebih efektif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan dilaksanakan pada tingkat kelurahan. Lokasi penelitian ini berada di Bontang Lestari, dengan objek penelitian berupa proses verifikasi dan validasi data kemiskinan serta tata kelola yang melingkupinya. Subjek penelitian meliputi aparaturnya kelurahan, ketua RT, serta pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti data DTKS/DTSN, laporan verifikasi dan validasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga data yang diperoleh dapat diuji validitasnya dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

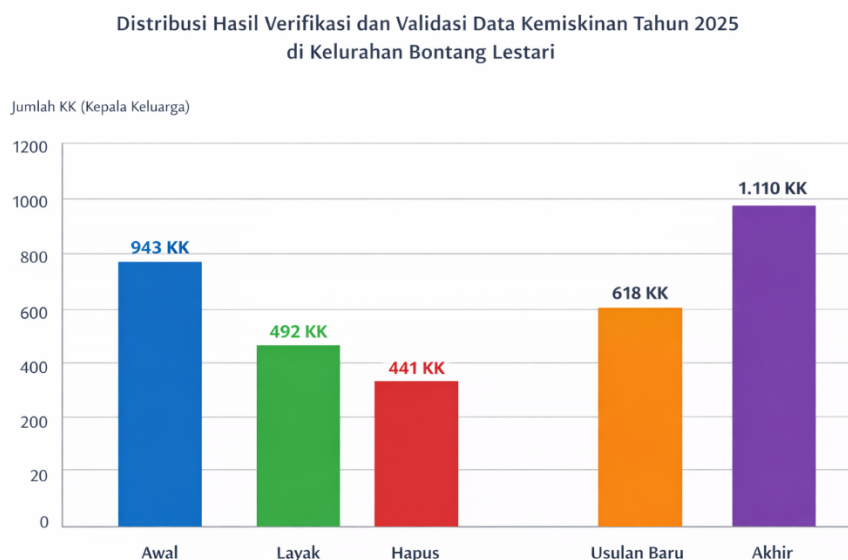
1. Tata Kelola Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Tingkat Kelurahan di Bontang Lestari, Kota Bontang

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen resmi dan data verifikasi tahun 2025, dapat dipahami bahwa tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari pada dasarnya telah berjalan dalam suatu pola kerja yang cukup sistematis. Proses tersebut dimulai dari pendataan awal, dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, verifikasi kondisi sosial ekonomi, penghapusan data yang tidak lagi sesuai, serta penambahan usulan baru bagi warga yang dinilai layak masuk dalam basis data kemiskinan. Pola ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memastikan akurasi data sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang menempatkan kelurahan sebagai ujung tombak dalam pendataan berbasis wilayah untuk mendukung ketepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Temuan tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa proses pendataan tidak dilakukan secara pasif. Salah satu aparaturnya kelurahan menyampaikan bahwa *“data lama memang dijadikan acuan awal, tapi tetap dicek lagi satu per satu di lapangan, karena kondisi warga itu cepat*

berubah.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses verifikasi telah dijalankan secara aktif dan tidak hanya bergantung pada data sebelumnya.

Gambar 1. Hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2025 Kel. Bontang Lestari



Sumber: Data penelitian diolah, 2026

Berdasarkan Diagram tersebut Jika dilihat dari hasil akhirnya, proses verifikasi dan validasi di Kelurahan Bontang Lestari menunjukkan perubahan data yang cukup signifikan. Data awal sebesar 943 KK atau 2.700 jiwa mengalami penyaringan menjadi 492 KK yang dinyatakan layak, 441 KK dihapus, serta 618 KK masuk sebagai usulan baru, sehingga total akhir menjadi 1.110 KK atau 2.315 jiwa. Perubahan ini memperlihatkan bahwa proses verval bukan sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme koreksi data. Hampir setengah data awal mengalami penghapusan, sementara jumlah usulan baru juga cukup tinggi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dengan kondisi riil masyarakat.

Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara di lapangan. Seorang ketua RT menyampaikan bahwa *“memang banyak yang berubah, ada yang sudah pindah, ada juga yang ekonominya sudah membaik. Tapi di sisi lain, masih ada warga yang sebenarnya butuh tapi belum masuk data sebelumnya.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan data kemiskinan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kondisi ini menunjukkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, proses verifikasi telah berjalan dengan baik karena mampu mengoreksi data secara nyata. Namun di sisi lain, besarnya perubahan data juga menunjukkan bahwa kualitas basis data sebelumnya belum sepenuhnya stabil. Seorang staf kelurahan bahkan menyebutkan bahwa *“kadang ada data lama yang masih*

tercatat, padahal orangnya sudah tidak tinggal di sini, jadi memang harus dicek ulang.” Hal ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada proses verifikasi saat ini, tetapi juga pada konsistensi pembaruan data sebelumnya.

Dilihat dari aspek akurasi data, proses verifikasi di Bontang Lestari telah dilakukan dengan pendekatan klasifikasi yang cukup rinci. Data tidak hanya dibagi menjadi layak dan tidak layak, tetapi juga mencakup kategori khusus seperti pindah domisili, meninggal dunia, maupun kondisi sosial ekonomi yang berubah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan secara sistematis. Seorang petugas verifikasi menyampaikan bahwa *“kami tidak hanya lihat data di komputer, tapi langsung turun ke rumah, lihat kondisi tempat tinggal dan aktivitas sehari-harinya.”*

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses verifikasi memang tidak berhenti pada pencocokan dokumen, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Dalam beberapa kasus, petugas harus melakukan konfirmasi ulang kepada warga sekitar untuk memastikan kondisi rumah tangga yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan dengan pendekatan faktual, bukan sekadar administratif.

Jika dilihat secara kuantitatif, sekitar 46,8% data awal mengalami penghapusan dan 65,5% berasal dari usulan baru. Pola ini menunjukkan bahwa data kemiskinan bersifat sangat dinamis dan membutuhkan pembaruan secara berkala. Hal ini juga diakui oleh aparat kecamatan yang menyatakan bahwa *“perubahan itu pasti ada setiap tahun, apalagi kondisi ekonomi sekarang cepat sekali berubah. Kalau tidak diperbarui, datanya langsung ketinggalan.”*

Dari aspek koordinasi, proses verifikasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelurahan, RT, hingga pemerintah kota. Secara struktural, koordinasi ini sudah berjalan dengan baik. Namun pada tingkat operasional, masih terdapat kendala, terutama karena kondisi wilayah Bontang Lestari yang memiliki kepadatan rendah dan sebaran permukiman yang cukup luas. Seorang petugas lapangan menyampaikan bahwa *“karena jarak antar rumah cukup jauh, proses pengecekan jadi butuh waktu lebih lama, jadi kami sangat bergantung pada informasi dari RT.”* Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan verifikasi.

Dari aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan RT dan warga menjadi faktor penting dalam mendukung akurasi data. Banyaknya usulan baru menunjukkan bahwa informasi dari masyarakat memiliki kontribusi besar dalam memperbaiki data kemiskinan. Seorang ketua RT menyampaikan bahwa *“banyak data baru itu justru dari laporan warga sendiri, karena mereka yang paling tahu kondisi di lingkungan.”*

Namun demikian, partisipasi ini juga memunculkan dinamika sosial, terutama terkait perbedaan persepsi mengenai kategori kemiskinan. Hal ini terlihat dari pernyataan aparat kelurahan yang menyebutkan bahwa *“kadang ada warga yang merasa layak, tapi setelah dicek ternyata tidak masuk kriteria, dan itu sering jadi perdebatan.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks.

Dari sisi transparansi, pemerintah daerah telah berupaya menyediakan sistem informasi berbasis digital untuk membuka akses data kepada publik. Namun dalam praktiknya, transparansi ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa *“warga biasanya hanya lihat hasilnya saja, tapi tidak semua paham bagaimana proses penentuannya.”* Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan data, tetapi juga dengan pemahaman masyarakat terhadap prosesnya.

Dari aspek akuntabilitas, proses verifikasi telah didukung oleh dokumentasi resmi dan forum pleno di tingkat kota. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan data memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, akuntabilitas juga harus diikuti dengan ketepatan kebijakan. Seorang warga menyampaikan bahwa *“yang penting itu setelah diverifikasi, bantuannya juga harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai masih ada yang tidak sesuai.”* Terakhir, dari aspek keberlanjutan, proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara insidental. Data kemiskinan harus diperbarui secara terus-menerus agar tetap relevan. Hal ini ditegaskan oleh aparat kecamatan yang menyatakan bahwa *“kalau hanya sekali diperbaiki, nanti berubah lagi. Jadi memang harus rutin diperbarui.”*

Temuan wawancara tersebut dapat dirangkum secara lebih sistematis sebagaimana disajikan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara

No	Informan	Peran	Inti Pernyataan
1	Aparatur Kelurahan	Pelaksana	<i>Data lama tetap dicek ulang karena kondisi warga berubah</i>
2	Ketua RT	Penghubung	<i>Banyak perubahan karena mobilitas dan ekonomi warga</i>
3	Staf Kelurahan	Administrasi	<i>Data lama sering tidak sesuai</i>
4	Tim Verifikasi	Lapangan	<i>Verifikasi dilakukan langsung ke rumah warga</i>
5	Aparat Kecamatan	Koordinator	<i>Data harus diperbarui secara berkala</i>
6	Petugas Lapangan	Verifikator	<i>Wilayah luas menjadi kendala pengecekan</i>
7	Ketua RT	Sosial	<i>Usulan baru banyak dari warga</i>
8	Aparatur Kelurahan	Pelaksana	<i>Perbedaan persepsi masyarakat sering terjadi</i>
9	Tokoh Masyarakat	Sosial	<i>Masyarakat belum memahami proses verifikasi</i>
10	Warga	Penerima	<i>Bantuan harus tepat sasaran</i>
11	Aparat Kecamatan	Pengawas	<i>Pembaruan data harus dilakukan rutin</i>

Sumber: Data penelitian diolah, 2026

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari telah berjalan secara struktural dan menunjukkan fungsi yang nyata dalam memperbaiki kualitas data. Namun demikian, secara substantif masih terdapat persoalan mendasar, terutama pada konsistensi pembaruan data, ketepatan klasifikasi rumah tangga, serta kesenjangan antara data administratif dan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, tata kelola yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal, sehingga masih diperlukan penguatan

berkelanjutan, baik dari sisi koordinasi, transparansi, maupun mekanisme pembaruan data agar kualitas data kemiskinan dapat lebih stabil, akurat, dan benar-benar menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

2. Kendala dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Upaya Perbaikannya di Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun sosial. Meskipun secara umum tata kelola telah berjalan, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang memengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Kendala tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola permasalahan yang cukup kompleks di tingkat lapangan.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah ketidakstabilan data akibat dinamika sosial ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi warga yang terjadi dalam waktu relatif cepat membuat data kemiskinan menjadi mudah usang apabila tidak diperbarui secara berkala. Dalam wawancara, salah satu aparatur kelurahan menyampaikan bahwa *“kadang data yang baru saja diperbarui, dalam beberapa bulan sudah berubah lagi, karena ada warga yang dapat pekerjaan, ada juga yang justru kehilangan penghasilan.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada proses verifikasi, tetapi pada karakter data kemiskinan itu sendiri yang sangat dinamis. Hal ini menjadi akar persoalan karena sistem pendataan sering kali tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan kondisi masyarakat.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan verifikasi lapangan. Proses verifikasi yang ideal seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan detail, namun dalam praktiknya jumlah petugas yang terbatas membuat proses ini tidak selalu berjalan optimal. Seorang petugas lapangan menyampaikan bahwa *“jumlah petugas tidak banyak, sementara wilayah cukup luas, jadi kami harus membagi waktu untuk cek semua data.”* Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi sering kali bergantung pada prioritas dan waktu yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterjangkauan pada beberapa rumah tangga tertentu. Dengan kata lain, keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kedalaman dan ketelitian verifikasi.

Selain itu, kondisi geografis wilayah Bontang Lestari juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan sebaran permukiman yang berjauhan, proses verifikasi lapangan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan wilayah yang padat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menyebutkan bahwa *“jarak antar rumah cukup jauh, jadi untuk satu hari tidak bisa banyak yang dicek, apalagi kalau aksesnya agak sulit.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor spasial tidak hanya memengaruhi efisiensi kerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan.

Kendala lainnya yang cukup menonjol adalah ketergantungan pada data lama yang belum sepenuhnya valid. Dalam beberapa kasus, data awal yang digunakan sebagai dasar verifikasi masih mengandung informasi yang tidak akurat, seperti warga yang sudah pindah atau tidak lagi memenuhi kriteria. Seorang staf kelurahan menyampaikan bahwa *“kadang data lama itu masih dipakai, padahal sudah tidak sesuai, jadi kami harus cek ulang dari awal.”* Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi menjadi lebih berat karena harus mengoreksi kesalahan data sebelumnya, bukan hanya memperbarui data yang ada. Dengan demikian, kelemahan pada tahap awal pendataan akan berdampak langsung pada beban kerja verifikasi berikutnya.

Dari sisi sosial, kendala yang cukup kompleks adalah perbedaan persepsi masyarakat terkait kategori kemiskinan. Tidak semua warga memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria rumah tangga miskin, sehingga sering muncul keberatan terhadap hasil verifikasi. Hal ini terlihat dari pernyataan aparatur kelurahan yang menyebutkan bahwa *“sering ada warga yang merasa layak, tapi setelah dicek tidak masuk kriteria, dan itu kadang menimbulkan keberatan.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang cukup kuat. Dalam beberapa kasus, keputusan verifikasi harus mempertimbangkan aspek objektivitas sekaligus menjaga hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap proses verifikasi dan validasi. Transparansi yang sudah mulai dibangun melalui sistem digital belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa *“warga biasanya hanya tahu hasilnya, tapi tidak semua paham bagaimana proses penentuannya.”* Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya efektif jika tidak diiringi dengan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, hasil verifikasi sering kali dipersepsikan secara sepihak tanpa memahami dasar penetapannya.

Selain itu, terdapat pula kendala dalam bentuk belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Meskipun pemerintah daerah telah mendorong penggunaan sistem berbasis digital, namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menyebabkan proses pencocokan data menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu tambahan. Dalam wawancara, salah satu petugas menyampaikan bahwa *“kadang data dari pusat, kecamatan, dan kelurahan tidak selalu sama, jadi harus disesuaikan lagi.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi data masih menjadi tantangan dalam tata kelola data kemiskinan.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak hanya terletak pada satu aspek, tetapi merupakan kombinasi dari faktor teknis, kelembagaan, sosial, dan sistem. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan juga harus bersifat menyeluruh dan tidak parsial.

Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah penguatan sistem pembaruan data secara berkala dan berkelanjutan. Proses verifikasi tidak seharusnya dilakukan secara insidental, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme rutin dalam pengelolaan data kemiskinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Pelatihan terkait teknik verifikasi, pemahaman indikator kemiskinan, serta penggunaan sistem digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar petugas mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

Dari sisi teknis, pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan, terutama dalam hal integrasi data dan pemutakhiran informasi secara real-time. Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap didukung oleh verifikasi lapangan agar data yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat. Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai kriteria kemiskinan dan proses verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi lebih konstruktif dan mendukung kualitas data.

Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi hal yang penting untuk memastikan keseragaman data. Integrasi sistem data antara tingkat pusat, daerah, hingga kelurahan perlu terus ditingkatkan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih efisien dan akurat. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari bersifat kompleks dan multidimensional. Namun demikian, melalui upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, tata kelola data kemiskinan dapat ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari telah berjalan dalam kerangka yang cukup sistematis dan menunjukkan fungsi nyata dalam memperbaiki kualitas data. Proses yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan verifikasi faktual melalui pengecekan langsung ke lapangan, klasifikasi data yang rinci, serta keterlibatan RT dan masyarakat dalam memberikan informasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan data yang signifikan, dimana hampir setengah data awal mengalami penghapusan dan terdapat penambahan usulan baru dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses verifikasi mampu mengoreksi ketidaktepatan data sebelumnya. Namun demikian, besarnya perubahan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa stabilitas dan konsistensi pembaruan data masih menjadi persoalan, sehingga tata

kelola yang berjalan belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam menjaga kesinambungan akurasi data dari waktu ke waktu.

Sementara itu, kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kelurahan Bontang Lestari bersifat kompleks dan saling berkaitan. Kendala utama meliputi dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah yang tersebar, serta ketergantungan pada data awal yang belum sepenuhnya valid. Selain itu, faktor sosial seperti perbedaan persepsi masyarakat terhadap kategori kemiskinan dan rendahnya pemahaman terhadap proses verifikasi juga menjadi hambatan tersendiri. Permasalahan lain yang turut memengaruhi adalah belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, sosial, dan sistem. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas data secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah kelurahan perlu menerapkan mekanisme pembaruan data secara rutin dan berkelanjutan agar data tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal penting, baik melalui penambahan jumlah petugas maupun pelatihan teknis terkait verifikasi dan penggunaan sistem digital. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi perlu dilakukan dengan tetap didukung oleh verifikasi lapangan untuk menjaga akurasi data. Keempat, perlu adanya penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kriteria kemiskinan dan proses verifikasi, sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi. Terakhir, integrasi data antarinstansi harus terus ditingkatkan guna menciptakan keseragaman data dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas data kemiskinan dapat semakin akurat, transparan, dan mampu menjadi dasar kebijakan yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, T. (2022). *Manajemen data dan kebijakan publik di era digital*. Rajawali Pers.
- Mendrofa, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., Yusup, R. M., Agussalim, A., Rizal, Handayani, D. N., Rizke, D., & Kusnadi, I. H. (2025). *Good governance melalui publik digital*. CV Mega Press Nusantara.

Noviko, S. (2024). *Birokrasi di era turbulensi*. Wawasan Ilmu.

Sarihati, T., Kurniadi, B., & Rohayati, Y. (2023). *Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik*. CV Mega Press Nusantara.

Suharto, E. (2023). *Kebijakan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia* (Edisi revisi). Alfabeta.

Sujarwoto, & Sahputri, R. A. M. (2023). *Public value management: Model tata kelola pelayanan publik*. Universitas Brawijaya Press.

Jurnal:

Ballu, D. Z. A., & Fahlevvi, M. R. (2025). Strategi adaptif dalam validasi data kemiskinan: Mengatasi kendala infrastruktur digital melalui pendekatan *door-to-door*. *Registratie*, 7(2), 128–142. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5906>

Hidayat, M. R. R., & Amirudin, M. D. (2024). Implementasi aplikasi BANGKIT dalam validasi dan verifikasi angka kemiskinan: Studi di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 166–175.

Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1). <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>

Setiawan, I., & Soraya, B. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten. *Registratie*, 7(2), 94–110. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5570>

Wardana, M. S., & Saribulan, N. (2024). Sosialisasi, verifikasi dan validasi data dalam pendataan keluarga miskin pada aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM) di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–13.

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi memutakhirkan data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas: Pembelajaran dari studi kasus di enam daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(2), 179–200. <https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013>

Yurisna, N., & Sarihati, T. (2025). Kualitas pelayanan publik Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam perspektif *good governance*. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.676>

Dokumen Instansi dan Laporan:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2025, October 14). *Persentase penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 3,21 persen, menurun 0,53 persen poin terhadap tahun 2024*.

Kelurahan Bontang Lestari. (2025). *Hasil verifikasi dan validasi serta usulan baru data kemiskinan Kelurahan Bontang Lestari tahun 2025*.

Pemerintah Kota Bontang. (2025). *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bontang Tahun 2025–2029*.

Sekretariat Daerah Kota Bontang. (2025, May 23). *Wali Kota dan Wawali pimpin rakor evaluasi 100 hari kerja, tekankan percepatan validasi data kemiskinan dan stunting*.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. (2026, April 7). *Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemkot Bontang hadirkan dashboard informasi terintegrasi.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.